

TESIS

**DETERMINAN TINGKAT URBANISASI DAN PENGARUHNYA TERHADAP
KESEMPATAN KERJA DI KOTA MAKASSAR TAHUN 2000-2019**

**DETERMINANTS OF THE LEVEL OF URBANIZATION AND ITS EFFECT ON JOB
OPPORTUNITIES IN THE CITY OF MAKASSAR IN 2000-2019**

DEWANTARA

A052191003



**PROGRAM STUDI MAGISTER EKONOMI SUMBER DAYA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

TESIS

**DETERMINAN TINGKAT URBANISASI DAN PENGARUHNYA TERHADAP
KESEMPATAN KERJA DI KOTA MAKASSAR TAHUN 2000-2019**

**DETERMINANTS OF THE LEVEL OF URBANIZATION AND ITS EFFECT ON JOB
OPPORTUNITIES IN THE CITY OF MAKASSAR IN 2000-2019**

Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar magister

Disusun dan diajukan oleh

DEWANTARA

A052191003



Kepada

**PROGRAM STUDI MAGISTER EKONOMI SUMBER DAYA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

TESIS

**DETERMINAN TINGKAT URBANISASI DAN
PENGARUHNYA TERHADAP KESEMPATAN KERJA DI
KOTA MAKASSAR TAHUN 2000-2019**

disusun dan diajukan oleh

**DEWANTARA
A052191003**

telah dipertahankan dalam sidang ujian tesis
pada tanggal **12 Agustus 2021**
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Komisi Penasihat

Ketua



Dr. Indraswati Tri Abdireviane, SE., MA.
NIP. 19651012 199903 2 001

Anggota



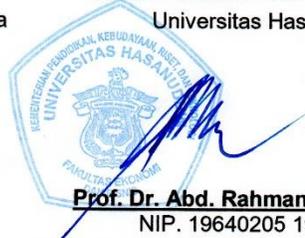
Dr. Hamrullah, SE., M.Si.
NIP. 19681221 199512 1 001

Ketua Program Studi
Magister Ekonomi Sumber Daya



Dr. Hj. Fatmawati, SE., M.Si
NIP. 19640106 198803 2 001

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si
NIP. 19640205 198810 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Dewantara
Nim : A052191003
Program Studi : Ekonomi Sumberdaya

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tesis yang berjudul:

“Determinan Tingkat Urbanisasi Dan Pengaruhnya Terhadap Kesempatan Kerja Di Kota Makassar Tahun 2000-2019”

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan/ditulis/diterbitkan sebelumnya, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat di dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan saya tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, Agustus 2021

Yang membuat pernyataan



Dewantara

ABSTRAK

DEWANTARA. *Determinan Tingkat Urbanisasi dan Pengaruhnya terhadap Kesempatan Kerja di Kota Makassar tahun 2000-2019* (dibimbing oleh Indraswati Tri Abdireviane dan Hamrullah).

Penelitian ini bertujuan menganalisis seberapa besar belanja pemerintah, indeks biaya hidup, dan indeks kemiskinan relatif terhadap kesempatan kerja melalui tingkat urbanisasi di Kota Makassar.

Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik. Metode analisis yang digunakan adalah metode estimasi persamaan simultan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel belanja pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat urbanisasi, tetapi tingkat urbanisasi tidak berpengaruh terhadap kesempatan kerja. Jadi, secara keseluruhan belanja pemerintah secara tidak langsung tidak berpengaruh terhadap kesempatan kerja melalui tingkat urbanisasi. Indeks biaya hidup secara tidak langsung tidak berpengaruh terhadap kesempatan kerja melalui tingkat urbanisasi. Indeks kemiskinan relatif secara tidak langsung tidak berpengaruh terhadap kesempatan kerja melalui tingkat urbanisasi. Dari 3 variabel sebagai determinan tingkat urbanisasi, ternyata hanya satu variabel yang berpengaruh signifikan terhadap tingkat urbanisasi yaitu variabel belanja pemerintah. Hal ini menunjukkan berhasilnya belanja pemerintah dalam menciptakan infrastruktur dan prasarana yang baik mampu menarik masyarakat yang berada di luar Kota Makassar. Namun, tingkat urbanisasi yang semakin meningkat ternyata tidak berpengaruh terhadap kesempatan kerja di Kota Makassar. Oleh karena itu, pemerintah Kota Makassar perlu menciptakan iklim investasi yang lebih bersifat padat karya, karena di samping menyerap tenaga kerja yang banyak, juga tidak memertukan modal yang tidak terlalu besar dengan dibandingkan dengan industri padat modal.

Kata kunci: Kesempatan Kerja, Tingkat Urbanisasi, Belanja Pemerintah, Indeks Biaya Hidup, Indeks Kemiskinan Relatif.



ABSTRACT

DEWANTARA. *The Urbanisation Level Determinants and their Effects on Job Opportunities in Makassar City in 2000 – 2019* (supervised by Indraswati Tri Abdireviane and Hamrullah).

The research aims to analyse how much government spending, living cost index, and relative poverty index on the job opportunities through the urbanisation level in Makassar City.

Data used were the secondary data obtained from the Central Bureau of Statistics. The analysis method used was the simultaneous equation estimation method.

The research result indicates that the government spending variable has the positive and significant effect on the urbanisation level, but the urbanisation level does not have any effect on the job opportunities. So overall, the government spending does not indirectly influence on the job opportunities through the urbanisation level. The living cost index does not indirectly affect the job opportunities through the urbanisation level. The relative poverty index does not indirectly have any effect on the job opportunities through the urbanisation level. Of the three variables as the urbanisation level determinants, it is apparent that only one variable which has the significant effect on the urbanisation level namely the government spending variable. This indicates that the success of the government spending in building the good infrastructures can attract the people who are out of Makassar City. However, the more increasing urbanisation level has no effect on the job opportunities in Makassar City. Therefore, Makassar City government needs to create the investment climate which is more labour-intensive because in addition to absorbing a lot of labourers, it also does not require too big capital compared with the capital-intensive industries.

Key words: Job opportunity, urbanisation level, government spending, living cost index, relative poverty index



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1. Landasan Teori.....	8
2.1.1. Konsep Ketenagakerjaan dan Tenaga Kerja.....	8
2.1.2. Kesempatan Kerja.....	9
2.1.3. Konsep Urbanisasi.....	13
2.1.4. Belanja Pemerintah.....	21
2.1.5. Indeks Biaya Hidup.....	25

2.1.6. Konsep Kemiskinan.....	27
2.1.7. Pengukuran Kemiskinan.....	29
2.1.8. Penyebab Kemiskinan.....	30
2.2. Hubungan antar Variabel.....	32
2.2.1. Hub. Belanja Pemerintah Dengan Tingkat Urbanisasi.....	32
2.2.2. Hub. Indeks Biaya Hidup Dengan Tingkat Urbanisasi.....	33
2.2.3. Hub. Indeks Kemiskinan Relatif Dengan Tingkat Urbanisasi.....	34
2.2.4. Hub. Tingkat Urbanisasi Dengan Kesempatan Kerja.....	34
2.3. Tinjauan Empiris.....	35
BAB III KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS.....	37
3.1. Kerangka Konseptual.....	37
3.2. Hipotesis.....	38
BAB IV METODE PENELITIAN.....	39
4.1. Jenis Dan Lokasi Penelitian.....	39
4.2. Jenis Dan Sumber Data.....	39
4.3. Model Pengumpulan Data.....	39
4.4. Metode Analisis.....	40
4.4.1. Uji Kesesuaian Dan Uji Statistik.....	40
4.5. Definisi Operasional Variabel.....	43
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	45
5.1. Gambaran Umum Kota Makassar.....	45
5.2. Deskripsi Variabel.....	48
5.2.1. Perkembangan Kesempatan Kerja.....	48

5.2.2. Perkembangan Tingkat Urbanisasi.....	51
5.2.3. Perkembangan Belanja Pemerintah.....	53
5.2.4. Perkembangan Indeks Biaya Hidup.....	54
5.2.5. Perkembangan Indeks Kemiskinan Relatif.....	56
5.3. Hasil Dan Pembahasan.....	58
5.3.1. Pengaruh Tidak Langsung Belanja Pemerintah Terhadap..... Kesempatan Kerja Melalui Tingkat Urbanisasi	62
5.3.2. Pengaruh Tidak Langsung Indeks Biaya Hidup Terhadap..... Kesempatan Kerja Melalui Tingkat Urbanisasi	64
5.3.3. Pengaruh Tidak Langsung Indeks Kemiskinan Relatif..... Terhadap Kesempatan Kerja Melalui Tingkat Urbanisasi	65
BAB VI PENUTUP	67
6.1. Kesimpulan.....	67
6.2. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN	73

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1. Perkembangan Jumlah Penduduk Dan Realisasi Belanja Pemerintah Di Kota Makassar.....	3
5.1. Luas Makassar Berdasarkan Luas Kecamatan.....	46
5.2. Perkembangan Kesempatan Kerja Kota Makassar Tahun 2000 - 2019.....	50
5.3. Perkembangan Penduduk Kota Makassar Tahun 2000-2019.....	52
5.4. Realisasi Belanja Pemerintah Kota Makassar Tahun 2000-2019.....	54
5.5. Indeks Biaya Hidup Berdasarkan Indeks Harga Konsumen Kota Makassar Tahun 2000-2019.....	55
5.6. Persentase Penduduk Miskin Kota Makassar Dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2000-2019.....	57
5.7. Hasil Uji Kelayakan Model Factor Konfirmatori Konstruk Eksogen.....	58
5.8. Assessment Of Normality (Group Number 1).....	60
5.9 Hasil Estimasi Regression Weight.....	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
3.1 Kerangka Konseptual.....	37
5.1. Diagram Jalur Dengan Nilai Estimate Model.....	62

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sebagai negara berkembang, Indonesia dihadapkan pada berbagai masalah, misalnya pengangguran, kemiskinan, tingkat pendapatan yang rendah dan sebagainya. Padahal pertumbuhan penduduk Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat, hal tersebut menimbulkan berbagai masalah baru seperti, pertumbuhan penduduk yang tidak merata, kemiskinan, dan semakin meningkatnya angka pengangguran.

Selain itu maraknya pembangunan di kota-kota besar di Indonesia dapat memacu pertumbuhan ekonomi. Sebagai dampaknya, kota-kota tersebut akan menjadi magnet bagi penduduk untuk berdatangan mencari pekerjaan dan bertempat tinggal. Hal ini sering disebut dengan urbanisasi. Namun urbanisasi ini menimbulkan berbagai macam masalah karena tidak ada pengendalian di dalamnya. Masalah ini yang dihadapi negara Indonesia saat ini yaitu pertumbuhan konsentrasi penduduk yang tinggi. Lebih buruk lagi, hal ini tidak diikuti dengan kecepatan yang sebanding dengan perkembangan industrialisasi. Masalah ini akhirnya menimbulkan fenomena yaitu urbanisasi berlebih (Sukirno, 2012).

Pembangunan Ekonomi sendiri adalah pertumbuhan ekonomi ditambah dengan pembangunan. Artinya, ada atau tidaknya pembangunan ekonomi dalam suatu negara pada suatu tahun tertentu tidak saja diukur dari kenaikan produksi barang dan jasa yang berlaku dari tahun ke tahun, tetapi juga perlu diukur dari perubahan lain yang berlaku dalam berbagai aspek kegiatan ekonomi seperti perkembangan pendidikan, perkembangan teknologi, peningkatan pendapatan dan kemakmuran masyarakat (Sukirno, 2012).

Dalam literatur pembangunan ekonomi, perpindahan penduduk dari desa ke kota dipandang sebagai berkah, karena surplus tenaga kerja di daerah perdesaan secara perlahan-lahan ditarik untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di perkotaan seiring dengan makin berkembangnya sektor industri. Proses tersebut dianggap memberikan keuntungan dari segi sosial, karena tenaga kerja dipindahkan dari lokasi dimana produk marjinal mereka boleh dikatakan nol, ketempat yang produk marjinalnya bukan hanya positif, tetapi juga lebih cepat berkembang sebagai hasil dari akumulasi modal dan kemajuan dibidang teknologi.

Dari segi ekonomi, redistribusi penduduk berarti menyediakan tenaga kerja serta keterampilan baik untuk perluasan produksi di daerah-daerah maupun pembukaan lapangan kerja baru. Disamping itu, akan timbul integrasi ekonomi dan pertumbuhan ekonomi, baik nasional maupun daerah. Ditinjau dari aspek idiologi, redistribusi penduduk berfungsi untuk meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara. Dari aspek politik, hal ini merupakan alat penunjang pembauran etnik, mempersempit kesenjangan kelas maupun wilayah, serta dapat meningkatkan hubungan antarkelompok (Agusta, 2013).

Seperti halnya dengan Kota Makassar yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, dimana Kota Makassar merupakan kota terbesar keempat di Indonesia dan terbesar di Kawasan Timur Indonesia memiliki luas areal 175,79 km² dengan jumlah penduduk pada tahun 2019 lebih dari 1.500.000 jiwa. Kota Makassar berhasil menjadi magnet bagi masyarakat yang ingin melakukan urbanisasi dikarenakan berbagai aspek yang jadi tujuan pelaku urbanisasi tersebut, seperti halnya pembangunan ekonomi di Kota Makassar terus mengalami perkembangan. Kota Makassar pun tidak lepas dari proses pembangunan ekonomi yang terus berlanjut dan ditingkatkan dari tahun ke tahun, dan kita ketahui bahwa Kota Makassar juga merupakan ibu kota di Provinsi Sulawesi Selatan yang

memiliki jumlah kepadatan penduduk yang terus bertambah dari tahun ke tahun. Hal ini dikarenakan sulitnya mencegah arus ekonomi yang semakin berkembang dan mengalami pertumbuhan yang bisa dikatakan baik. Yang menyebabkan arus penduduk baik ulang-alik dari desa menuju kota maupun secara permanen berlomba untuk mendapatkan kehidupan yang layak di Kota Makassar yaitu arus penduduk urbanisasi. Adapun kita dapat melihat tabel di bawah ini bagaimana perkembangan migrasi masuk dan jumlah penduduk di Kota Makassar beberapa tahun terakhir.

Tabel 1.1
Perkembangan Jumlah Penduduk dan Realisasi Belanja Pemerintah
Di Kota Makassar

No	Tahun	Migrasi masuk (jiwa)	Jumlah penduduk (jiwa)	Realisasi belanja pemerintah (Rp)
1	2010	21.244	1.339.374	1.304.272.866.240
2	2011	22.188	1.450.169	1.711.878.129.986
3	2012	2.052	1.504.926	1.966.706.011.525
4	2013	14.859	1.546.136	2.335.016.785.371
5	2014	32.859	1.583.683	2.606.083.333.328
6	2015	57.000	1.449.401	3.062.274.393.638
7	2016	140.718	1.469.601	3.278.336.075.089
8	2017	152.066	1.489.011	3.313.623.623.887
9	2018	41.642	1.508.154	3.526.081.002.897
10	2019	26.134	1.526.677	3.549.123.220.750

Sumber : BPS dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar

Dari tabel di atas bisa dilihat bahwa penduduk migrasi masuk kota Makassar dari tahun 2010 mengalami fluktuasi jumlah penduduk migrasi ke tahun 2012, namun pada tahun 2013 mengalami peningkatan secara terus menerus hingga tahun 2017, dan kita bisa melihat jumlah penduduk tiap tahunnya mengalami peningkatan. Begitupun realisasi belanja pemerintah Kota Makassar yang terus meningkat tiap tahunnya yang menandakan terus meningkatnya pembangunan di Kota Makassar. Dimana ini menandakan bahwa Kota Makassar merupakan kota

yang memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat untuk melakukan urbanisasi baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Kenaikan penduduk masuk di Kota Makassar terus terjadi tiap tahun dan terus bertambah seperti yang terlihat pada tahun 2017 mengalami lonjakan pertumbuhan migrasi masuk. Hal ini dikarenakan faktor-faktor keinginan hidup yang lebih layak dari berbagai kabupaten di Sulawesi Selatan menuju Kota Makassar.

Hasil pembangunan secara nyata tercermin dalam pendapatan masyarakat, peningkatan jumlah angkatan kerja dan pembangunan infrastruktur yang semuanya merupakan hasil dari seluruh upaya dari pembangunan. Mengingat sektor pembangunan saling terkait satu dengan yang lain, maka kelemahan dalam suatu sektor akan membatasi efisiensi dan efektifitas sektor yang lainnya. Hal tersebut dapat menyebabkan rendahnya efisiensi dan efektifitas pembangunan secara keseluruhan.

Kota Makassar dengan penduduk yang terus bertambah dapat dikatakan sebagai kota metropolitan yang kapan saja berlaku baik dan sewaktu-waktu bisa menjadi musuh bagi pelaku urbanisasi. Mengapa demikian, karena kita ketahui Kota Makassar memiliki daya tarik bagi pelaku urbanisasi seperti industri-indutri yang menjanjikan peluang kerja (kesempatan kerja) yang sangat menggiurkan bagi siapa saja yang ingin ke kota Makassar untuk menjadi tenaga kerja yang berhasil.

Menurut Lee (1966), Todaro (1979), dan Titus (1982), berpendapat bahwa motivasi seseorang untuk pindah adalah motif ekonomi. Motif tersebut berkembang karena adanya ketimpangan antar daerah. Todaro menyebutkan motif utama tersebut sebagai pertimbangan ekonomi yang rasional. Mobilitas ke perkotaan mempunyai dua harapan yaitu memperoleh pekerjaan dan harapan memperoleh pendapatan yang lebih tinggi dari pada yang diperolehnya di tempat

asal. Pada dasarnya penyebab meningkatnya urbanisasi di negara berkembang yakni untuk meningkatkan kesejahteraan hidup yang diiringi dengan keinginan untuk mencari pekerjaan (bekerja) sehingga secara langsung dapat memengaruhi pendapatan bagi para urban tersebut, dengan kelebihan penghasilan selama mereka bekerja di kota akan berimbas secara langsung pada keluarga yang tinggal di desa sehingga dari segi pemenuhan kebutuhan hidup menjadi lebih baik.

Hal demikian inilah yang menjadi persoalan dan masalah yang penting untuk diatasi oleh pemerintah daerah agar mengantisipasi dan membatasi masyarakat yang melakukan urbanisasi dari tahun ke tahun yang terus mengalami peningkatan. Sehingga menyebabkan berbagai dampak bagi masyarakat maupun terhadap kota tujuan urbanisasi tersebut. Jumlah lahan yang semakin sedikit menyebabkan banyaknya kawasan-kawasan permukiman kumuh bagi masyarakat yang terpaksa ingin memiliki tempat tinggal di Kota Makassar, bahkan banyak yang kita jumpai di Kota Makassar oleh penduduk yang merupakan penduduk urbanisasi.

Adapun faktor non-ekonomi lainnya, yaitu karena ingin melanjutkan pendidikan. Karena pendidikan di kota bisa dikatakan lebih berkualitas dan baik dibandingkan di desa-desa atau kabupaten yang jauh dari kata modern seperti di Kota Makassar. Faktor non-ekonomi lainnya, yaitu perkawinan antara penduduk desa dengan penduduk yang bermukim di kota, serta terjadinya arus sosial-politik yang terjadi di suatu daerah ke kota. Hal inilah yang paling mendasari terjadinya urbanisasi di Kota Makassar.

Dilihat dari berbagai fenomena maupun fakta yang terjadi di Kota Makassar beberapa tahun mengenai urbanisasi yang dilakukan oleh berbagai masyarakat di suatu daerah ke daerah lain maka penulis ingin melihat kondisi perkembangan urbanisasi serta faktor-faktor apa saja yang memengaruhinya. Berdasarkan

pemaparan diatas, maka peneliti memilih dan tertarik untuk mengangkat masalah mengenai: “ **Determinan Tingkat Urbanisasi Dan Pengaruhnya Terhadap Kesempatan Kerja Di Kota Makassar Tahun 2000-2019** ”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah belanja pemerintah berpengaruh secara tidak langsung terhadap kesempatan kerja melalui mediasi tingkat urbanisasi di Kota Makassar?
2. Apakah indeks biaya hidup berpengaruh secara tidak langsung terhadap kesempatan kerja melalui mediasi tingkat urbanisasi di Kota Makassar?
3. Apakah indeks kemiskinan relatif berpengaruh secara tidak langsung terhadap kesempatan kerja melalui mediasi tingkat urbanisasi di Kota Makassar?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh tidak langsung belanja pemerintah terhadap kesempatan kerja melalui mediasi tingkat urbanisasi di Kota Makassar.
2. Untuk mengetahui pengaruh tidak langsung indeks biaya hidup terhadap kesempatan kerja melalui mediasi tingkat urbanisasi di Kota Makassar.
3. Untuk mengetahui pengaruh tidak langsung indeks kemiskinan relatif terhadap kesempatan kerja melalui mediasi tingkat urbanisasi di Kota Makassar.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada pihak yang berkepentingan sebagai berikut :

1. Pemerintah

Sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan pemerintah daerah, yang terarah dan tidak menimbulkan masalah baru bagi pembangunan daerah, dalam mengantisipasi tingkat urbanisasi dan kesempatan kerja di Kota Makassar.

2. Akademis

Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai suatu karya ilmiah yang dapat menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan masukan yang dapat mendukung bagi peneliti maupaun pihak lain yang tertarik dalam bidang penelitian yang sama.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Konsep Ketenagakerjaan dan Tenaga Kerja

Tenaga kerja merupakan salah satu faktor yang penting dalam proses produksi selain tanah, modal, dan lain-lain. Sebagai faktor produksi penting, manusia merupakan penggerak bagi seluruh faktor-faktor produksi tersebut. Istilah kesempatan kerja mengandung pengertian lapangan pekerjaan atau kesempatan yang tersedia untuk bekerja akibat dari suatu kegiatan ekonomi (produksi). Dengan demikian pengertian kesempatan kerja adalah mencakup lapangan pekerjaan yang sudah diisi dan semua lapangan pekerjaan yang masih lowong. Dari lapangan pekerjaan yang masih lowong tersebut (yang mengandung arti adanya kesempatan), kemudian timbul kebutuhan akan tenaga kerja.

Ketenagakerjaan merupakan salah satu sektor penting bagi pembangunan ekonomi nasional dan khususnya dalam upaya pemerintah untuk mengurangi jumlah penduduk miskin. Dengan menciptakan dan menerapkan berbagai program pembangunan pada sektor ekonomi dan sektor ketenagakerjaan pada kelompok penduduk yang tergolong miskin; sehingga kelompok tersebut diharapkan dapat meningkatkan pendapatan yang sekaligus akan meningkatkan kesejahteraannya.

Aktivitas ketenagakerjaan diterapkan melalui pembinaan yang menuntun kemampuan, keahlian dan keterampilan tenaga kerja untuk menggunakannya. Penerapan pembinaan tersebut dilakukan dengan berjenjang, berlanjut dan berkait yang bertujuan meningkatkan kesetiaan dan ketaatan; menghasilkan

tenaga kerja yang berdaya guna dan berhasil guna, meningkatkan kualitas, keterampilan serta memupuk semangat dan moral pekerja, mewujudkan iklim kerja yang kondusif, memberikan pembekalan dalam rangka distribusi tenaga kerja (Sastrohadiwiryono, 2003).

Data kesempatan kerja secara nyata sulit diperoleh, maka untuk keperluan praktis digunakan pendekatan bahwa jumlah kesempatan kerja didekati melalui banyaknya lapangan kerja yang terisi yang tercermin dari jumlah penduduk yang bekerja (*employed*). Lewis (Subri, 2003) dalam teorinya mengemukakan bahwa kelebihan pekerja merupakan kesempatan dan bukan suatu masalah, di mana kelebihan pekerja satu sektor ekonomi akan memberikan andil terhadap pertumbuhan *output* dan penyediaan pekerja di sektor lain. Lebih murah biaya upah asal pedesaan terutama dari sektor pertanian akan dapat menjadi pendorong bagi pengusaha perkotaan untuk memanfaatkan pekerja tersebut dalam pengembangan industri modern perkotaan.

Selama berlangsungnya proses industrialisasi, maka kelebihan penawaran pekerja di sektor pertanian akan terserap. Harrod-Domar (Todaro, 2000) dalam teori pertumbuhannya menyatakan bahwa secara definitif tingkat pertumbuhan *output* (Y) dikurangi dengan tingkat pertumbuhan produktivitas tenaga kerja (Y/L) kurang lebih sama dengan pertumbuhan kesempatan kerja (L).

2.1.2 Kesempatan Kerja

Dalam *ilmu ekonomi*, kesempatan kerja berarti peluang atau keadaan yang menunjukkan tersedianya lapangan pekerjaan sehingga semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja dalam proses produksi dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahlian, keterampilan dan bakatnya masing-masing.

Kesempatan Kerja (*demand for labour*) adalah suatu keadaan yang menggambarkan ketersediaan pekerjaan (lapangan kerja untuk diisi oleh para pencari kerja). Dengan demikian kesempatan kerja dapat diartikan sebagai permintaan atas tenaga kerja. Sedangkan, (Sumarsono,2003) memberikan definisi bahwa kesempatan kerja adalah lapangan pekerjaan yang sudah terisi (*employment*) dan masih lowongan (*vacancy*). Lebih jauh dijelaskan bahwa dalam teori kesempatan kerja dikenal istilah elastisitas permintaan akan tenaga kerja yang diartikan sebagai persentase perubahan permintaan akan tenaga kerja sehubungan dengan perubahan permintaan akan tenaga kerja yang di sebabkan dengan perubahan satu persen pada tingkat upah.

Hal ini didasarkan pada ide dasar *Human Capital Model*. Dalam model ini niat untuk melakukan migrasi dipengaruhi oleh motivasi untuk mencari kesempatan kerja dan pendapatan yang lebih baik. Dalam konteks ini pun, Todaro(1983) mengemukakan bahwa keputusan seseorang untuk melakukan migrasi merupakan respon dari harapan untuk memperoleh kesempatan kerja dan pendapatan yang lebih baik. Menurut Todaro, sektor modern di perkotaan merupakan sektor penarik utama migrasi tenaga kerja, khususnya bagi tenaga kerja terampil (Kartika, 2015).

Strategi pembangunan yang diterapkan juga akan memengaruhi usaha perluasan kesempatan kerja. Strategi pembangunan dan sasaran tujuan nasional harus benar-benar memperhatikan aspek sumber daya manusia dalam memasuki lapangan kerja, orientasi untuk peningkatan GDP (*Gross Domestic Product*) harus terlebih dahulu diikuti oleh peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan ketrampilan yang memadai agar dalam pembangunan tersebut peningkatan GDP (*Gross Domestic Product*) juga diikuti dengan peningkatan produktivitas kerja.

Secara agregat jumlah orang yang bekerja yang dimuat dalam publikasi Badan Pusat Statistik, sering digunakan sebagai petunjuk tentang luasnya kesempatan kerja. Dalam pengkajian ketenagakerjaan, kesempatan kerja sering dijadikan acuan sebagai permintaan tenaga kerja (Arfida, 2003). Kesempatan kerja atau permintaan tenaga kerja merupakan banyaknya orang yang bekerja pada berbagai sektor perekonomian, baik sektor pertanian, industri maupun jasa. Permintaan tenaga kerja merupakan permintaan turunan (*derived demand*), artinya permintaan tenaga kerja oleh suatu perusahaan tergantung pada permintaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut, Bellante dan Jackson (Kartika, 2015).

Secara umum kesempatan kerja merupakan keadaan yang menggambarkan seberapa jumlah total dari angkatan kerja yang mampu diserap serta ikut aktif dalam perekonomian. Kesempatan kerja juga dapat dikatakan sebagai jumlah penduduk yang sedang bekerja ataupun yang mendapatkan pekerjaan, jika semakin banyak orang yang bekerja maka kesempatan kerjanya cukup luas atau banyak. Dalam ekonomi *Neoklasik* bahwa penyediaan atau penawaran tenaga kerja akan bertambah bila tingkat upah bertambah. Sebaliknya permintaan terhadap tenaga kerja akan berkurang bila tingkat upah meningkat. *Teori neoklasik* beranggapan bahwa jumlah penyediaan tenaga kerja selalu sama dengan permintaan. Keadaan pada saat penyediaan tenaga kerja sama dengan permintaan dinamakan terjadinya *ekuilibrium* atau keseimbangan.

Dalam hal penyediaan tenaga kerja sama dengan permintaan, tidak terjadi pengangguran. Pengertian kesempatan kerja yaitu suatu keadaan yang mencerminkan sampai jumlah berapa dari total angkatan kerja yang dapat diserap dapat ikut serta aktif dalam suatu kegiatan perekonomian suatu negara. Dengan

kata lain kesempatan kerja adalah jumlah penduduk yang bekerja atau telah mendapatkan pekerjaan.

Berdasarkan pada data sensus penduduk, jumlah penduduk yang bekerja biasanya dipandang sebagai jumlah kesempatan kerja yang ada. Ini berarti bahwa kesempatan kerja bukanlah lapangan pekerjaan yang masih terbuka, walaupun komponen yang terakhir ini akan menambah kesempatan kerja yang ada di waktu yang akan datang. *Kaum klasik seperti Adam Smith, David Ricardo dan Thomas Robert Malthus* berpendapat bahwa selalu ada perlombaan antara tingkat perkembangan *output* dengan tingkat perkembangan penduduk yang akhirnya dimenangkan oleh perkembangan penduduk. Karena penduduk juga berfungsi sebagai tenaga kerja, maka akan terdapat kesulitan dalam penyediaan lapangan pekerjaan. Kalau penduduk itu dapat memperoleh pekerjaan, maka hal ini akan dapat meningkatkan kesejahteraan bangsanya. Tetapi jika tidak memperoleh pekerjaan berarti mereka akan menganggur, dan justru akan menekan standar hidup bangsanya menjadi lebih rendah (Jhingan, 2014).

Dimensi masalah ketenagakerjaan bukan hanya sekedar keterbatasan lapangan atau peluang kerja serta rendahnya produktivitas namun jauh lebih serius dengan penyebab yang berbeda-beda. Pada dasawarsa yang lalu, masalah pokoknya tertumpu pada kegagalan penciptaan lapangan kerja yang baru pada tingkat yang sebanding dengan laju pertumbuhan output industri. Seiring dengan berubahnya lingkungan makro ekonomi mayoritas negara-negara berkembang, angka pengangguran yang meningkat pesat terutama disebabkan oleh "terbatasnya permintaan" tenaga kerja, yang selanjutnya semakin dicitkan oleh faktor-faktor eksternal seperti memburuknya kondisi neraca pembayaran, meningkatnya masalah utang luar negeri dan kebijakan lainnya, yang pada

gilirannya telah mengakibatkan kemerosotan pertumbuhan industri, tingkat upah, dan akhirnya, penyediaan lapangan kerja.

Di lain pihak, Arsyad (1999) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah diartikan sebagai kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak. Hal ini berarti bahwa pertumbuhan ekonomi daerah secara langsung ataupun tidak langsung akan menciptakan lapangan kerja.

Kesempatan kerja dapat menjadi suatu partisipasi seseorang dalam artian memikul beban pembangunan maupun dalam menerima kembali hasil dari pembangunan tersebut. Kesempatan kerja dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, diantaranya sebagai berikut ini:

a. Kesempatan kerja permanen merupakan kesempatan kerja yang memungkinkan orang yang bekerja secara terus menerus sampai pensiun atau sampai tidak lagi mampu untuk bekerja, misalnya seperti seseorang yang bekerja di instansi pemerintahan atau di instansi swasta yang dimana memiliki jaminan sosial hingga tua.

b. Kesempatan kerja temporer merupakan kesempatan kerja yang memungkinkan orang yang bekerja dalam waktu yang singkat, lalu menganggur dan mencari pekerjaan yang baru lagi.

2.1.3 Konsep Urbanisasi

Urbanisasi di negara berkembang dimulai sejak Perang Dunia (PD) II, dan merupakan titik tolak terjadinya industri (kebalikan dari negara industri maju). Akibatnya penduduk kota meningkat cepat sehingga urbanisasi tidak terbagi rata.

Semakin besar kotanya, semakin cepat proses urbanisasinya, sehingga memunculkan konsep "*Primate City*". Hal ini lah yang terjadi di Indonesia saat ini, yaitu berduyunduyunnya masyarakat desa ke kota sehingga daerah perkotaan semakin padat penduduk.

Pertumbuhan kota dan cara pengembangannya pada saat ini selalu menjadi masalah yang sering banyak dibicarakan oleh banyak pihak khususnya masyarakat dan pemerintah daerah terhadap kota kecil dan menengah (*secondary city*). Kota kecil dan menengah merupakan kota yang masih mengalami ketergantungan pada kota inti/kota besa (*primate city*) karena keterbatasan dalam fungsi inti kotanya masih relatif kurang. Permasalahan seperti ini sebenarnya suatu hal yang harus diperhatikan dan dirasakan baik itu oleh pemerintah setempat dan penduduknya akan tetapi masih saja tidak terjadi perubahan. Padahal apabila kota kecil dan menengah banyak perhatian dari berbagai pihak maka akan terjadi peningkatan pengembangan wilayah yang cepat. Metode yang tepat untuk formula awal dalam perencanaan pengembangan kota kecil dan menengah yakni konsep Dekonsentrasi Planologis.

Definisi dari Dekonsentrasi Planologis ialah upaya dalam mengembangkan kota-kota kecil dan menengah dengan penyebaran/pembangunan fungsi inti kota besar ke arah luar dengan harapan kota-kota tersebut bisa lebih berkembang dan mandiri dan tidak selalu bergantung pada kota inti/kota besar (*primate city*). Misalnya memindahkan fungsi penting kota ke arah luar kota inti seperti membangun kampus, industri, pusat pelayanan, dan lain-lain di daerah luaran kota besar yakni di kota kecil dan menengah agar mengurangi beban kota inti atau kota besar (*primate city*). Urbanisasi sendiri berasal dari kata Urban yang artinya sifat kekotaan. Di Indonesia sendiri diartikan sebagai perpindahan penduduk desa ke

kota, urbanisasi didefinisikan sebagai suatu proses terbentuknya kehidupan perkotaan yang berbeda dengan kehidupan pedesaan, dalam konteks ekonomi, sosial dan mentalitas masyarakatnya (Soetomo, 2009).

Namun karena adanya kelemahan wilayah pedesaan akan terus menciptakan kesenjangan desa kota dan proses kemiskinan selanjutnya akan mengalir ke kota dengan migrasi akibat *push factor* karena makin langkanya sumber kehidupan di desa. Proses urbanisasi melalui arus migrasi tersebut menempatkan kota-kota besar dalam proses selektif sosio spasial yang menciptakan kemiskinan kota, kesenjangan yang rawan terhadap kelompok yang dikategorikan sebagai sektor informal dan *pseudo urbanisasi* (urbanisasi semu).

Teori Lewis, menyebutkan bahwa ekonomi terdiri dari atas dua sektor. Pertama, sektor substitusi pedesaan tradisional. Sektor ini ditandai oleh produktivitas yang sangat rendah atau nol. Kedua, sektor industri perkotaan modern dengan produktivitas yang tinggi. Dua hal yang berbeda tersebut mengakibatkan terjadinya aliran tenaga kerja dari daerah pedesaan menuju perkotaan. Proses pertumbuhan sektor modern dan perluasan kesempatan kerja akan berlanjut terus sampai semua surplus tenaga kerja di pedesaan terserap oleh sektor perekonomian modern di perkotaan.

Seperti yang disebutkan sebelumnya, perpindahan penduduk dari pedesaan ke perkotaan hanya salah satu penyebab meningkatnya penduduk perkotaan. Perpindahan itu sendiri dikategorikan menjadi dua macam yaitu (i) Perpindahan dengan tujuan menetap, dan (ii) Perpindahan yang bersifat sementara. Niat untuk pindah dari desa ke kota biasanya karena pengaruh kuat dalam bentuk ajakan, informasi media massa, impian pribadi, terdesak kebutuhan ekonomi, dan lain-lainnya. Adapun faktor pendorong terjadinya urbanisasi, a).

Makin berkurangnya sumber-sumber kehidupan seperti menurunnya daya dukung lingkungan, menurunnya permintaan atas barang-barang tertentu yang bahan bakunya makin sulit diperoleh seperti hasil tambang, kayu atau bahan pertanian (yang bersumber dari alam), b). Menyempitnya lapangan pekerjaan di tempat asal, sebagai contoh dapat kita lihat tanah untuk pertanian di wilayah pedesaan yang semakin sempit, dapat kita lihat banyaknya daerah pertanian yang diambil alih dan dibangun pemukiman masyarakat. c). Adanya tekanan-tekanan, seperti politik, agama dan suku sehingga mengganggu hak asasi penduduk di daerah asalnya. d). Alasan pendidikan, pekerjaan atau perkawinan. e). Bencana alam, seperti banjir, kebakaran, gempa bumi, tsunami, musim kemarau panjang atau adanya wabah penyakit. Sebagai akibat dari cepatnya pertumbuhan penduduk yang ditunjang dengan perkembangan ekonomi, transportasi dan pendidikan, frekuensi mobilitas yang semakin meningkat, urbanisasi memiliki implikasi terhadap berbagai sektor kehidupan.

Teori social surplus dari (Robbert Potter, 1998) dalam menjelaskan proses urbanisasi ini menarik untuk diperhatikan karena teori ini berada dalam suatu paradigma yaitu urbanisasi sebagai proses modernisasi. Dan proses modernisasi ini merupakan proses perubahan masyarakat yang tidak sama kecepatan dari waktu ke waktu (Soetomo, 2009). Sensus Penduduk (SP) tahun 1961 dan 1971 yang dimaksud dengan urban, yaitu ibukota kabupaten, kotamadya, dan kota-kota lain yang mempunyai fasilitas modern, seperti listrik, air, bioskop, sekolah lanjutan atas, dan rumah sakit. Sedangkan dalam SP tahun 1980 defenisi ini mengalami beberapa modifikasi (Moertiningsih S dan Bulan O, 2015).

Pemenuhan akan kebutuhan hidup haruslah dipenuhi. Sampai saat ini para migran menjadikan motif ekonomi sebagai alasan seseorang untuk melakukan

perpindahan. Gilbert & Gugler (1996) mengatakan mayoritas penduduk berpindah karena alasan ekonomi. Dustmann (2012) menambahkan tidak hanya alasan ekonomi, melainkan ada juga yang disebabkan oleh bencana alam (*natural disaster*). Faktor ekonomi yang dimaksud dapat berupa status pekerjaan, tingkat upah, jumlah pendapatan, kepemilikan rumah, dan kepemilikan lahan pertanian. Orang cenderung untuk pindah ke daerah yang menjanjikan hidup yang lebih baik (Ananta, 1998).

Teori Kependudukan Malthus menyatakan dalam edisi pertamanya *Essay on Population* tahun 1798 mengemukakan dua pokok pendapatnya yaitu ; (a) Bahan makanan adalah penting untuk kehidupan manusia, (b) nafsu manusia tak dapat ditahan. Dimana yang dimaksud adalah bahwa pertumbuhan penduduk jauh lebih cepat dari bahan makanan. Akibatnya pada suatu saat akan terjadi perbedaan yang besar antara penduduk dan kebutuhan hidup. Secara umum, *Urbanisasi (Urbanization)* adalah bertambahnya proporsi penduduk yang berdiam di daerah kota yang disebabkan oleh proses perpindahan penduduk ke kota dan atau akibat dari perluasan daerah kota. Definisi urban berbeda-beda antara suatu negara dengan negara lainnya tetapi biasanya pengertiannya berhubungan dengan kota-kota atau daerah-daerah pemukiman lain yang padat. Klasifikasi yang dipergunakan untuk menentukan daerah kota biasanya dipengaruhi oleh indikator mengenai penduduk, indikator mengenai kegiatan ekonomi indikator jumlah fasilitas urban atau status administrasi suatu pemusatan penduduk.

Urbanisasi sendiri merupakan bagian dari mobilitas penduduk dari migrasi dan transmigrasi. Namun menurut Paul Knox merumuskan bahwa urbanisasi sebagai proses yang dimotori oleh perubahan ekonomi yang mendorong dan didorong oleh faktor-faktor manusia, sumber daya alam dan teknologi (sumber

daya buatan) dan menghasilkan keluaran keadaan ekonomi, sosial dan fisik serta masalah-masalah yang menjadi bahan yang harus diatasi dalam penentuan kebijakan pembangunan kota (Soetomo, 2009). Dari beberapa pengertian mengenai urbanisasi yang diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian urbanisasi adalah merupakan suatu proses perubahan dari desa ke kota yang meliputi wilayah/daerah beserta masyarakat di dalamnya dan dipengaruhi oleh aspek- aspek fisik atau morfologi, sosial, ekonomi, budaya, dan psikologi masyarakatnya (Moertiningsih S dan Bulan O, 2015).

Menurut (Alan Garnier,1984) berpendapat bahwa Urbanisasi adalah suatu jalan (pergerakan) dari mentalitas pedesaan ke mentalitas kota, dan urbanisasi juga merupakan suatu proses pengembangan dan konsentrasi ruang terbangun. Urbanisasi dicirikan oleh pergerakan migrasi penduduk dari lokasi kecil pedesaan ke lokasi besar perkotaan, dan serta merupakan suatu yang menyangkut tingkat jumlah penduduk kota dari suatu masyarakat terhadap populasi totalnya (Soetomo, 2009).

(Shogo kayono dalam Abbas, 2002) memberikan pengertian urbanisasi sebagai perpindahan dan pemusatan penduduk secara nyata yang memberi dampak dalam hubungannya dengan masyarakat baru yang dilatarbelakangi oleh faktor sosial, ekonomi, politik dan budaya. Sementara Keban dalam Abbas (2002) berpendapat bahwa urbanisasi jangan hanya dalam konteks demografi saja karena urbanisasi mengandung pengertian yang multidimensional (Ramadhani, 2013).

Ketersediaan data mengenai migrasi dapat ditemukan pada registrasi penduduk, sensus penduduk dan survei penduduk (Mantra, 2010). Data yang tersedia belum dapat menggambarkan secara keseluruhan mengenai migrasi

yang terjadi. Sumber data dari registrasi penduduk sampai saat ini kurang dapat dipercaya. Hal ini dikarenakan proses dalam pengambilan data dilapangan yang kurang baik. Sehingga hasil yang didapat kurang dapat dipercaya. Selain dari registrasi penduduk, terdapat sumber data sensus penduduk yang lebih lengkap dari pada hasil registrasi penduduk, tetapi dalam sensus penduduk hanya mengumpulkan informasi umum mengenai mobilitas penduduk. Untuk melengkapi data tersebut maka muncul survei penduduk. Survei penduduk sifatnya terbatas tetapi memiliki informasi yang dikumpulkan lebih luas dan mendalam. Biro Pusat Statistik (BPS) mengadakan survei-survei kependudukan misalnya Survei Ekonomi Nasional yang dimulai tahun 1963, Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS), dan Survei Antar Sensus (SUPAS).

(S. Kuznets, 1995) dalam bukunya *Modern Economic Growth* menyatakan Urbanisasi memengaruhi tingkat dan struktur pengeluaran konsumen negara melalui tiga cara. *Pertama*, urbanisasi menghasilkan pembagian kerja dan spesialisasi yang makin meningkat dan perubahan berbagai aktivitas dari usaha keluarga atau desa yang tidak berorientasi pasar menjadi usaha yang berorientasikan pasar. Banyak pengolahan makanan, penjahitan, pembuatan pakaian dan bahkan pembuatan atau perbaikan rumah yang suatu saat dikerjakan di dalam rumah atau atas usaha bersama, kini sebagian besar dikerjakan oleh perusahaan bisnis di dalam masyarakat modern perkotaan. *Kedua*, urbanisasi membuat biaya pemenuhan sejumlah kebutuhan menjadi semakin mahal. Kehidupan kota menjadi lebih mahal karena faktor kemacetan dan kepadatan. Ini menyebabkan kesulitan di bidang perumahan, kebersihan, air, angkutan dalam antarkota, dan fasilitas dasar lainnya. Kesemua ini merupakan biaya ekstra bagi kehidupan kota yang menambah pengeluaran konsumen pada berbagai jenis

barang konsumsi. *Ketiga, demonstration-effect* kehidupan kota mendorong kelompok urbanis meniru pola konsumsi orang kota sehingga menyebabkan meningkatnya pengeluaran konsumen (Jhingan, 2014).

Di Indonesia, persoalan urbanisasi sudah dimulai dengan digulirkannya beberapa kebijakan “gegabah” orde baru. Pertama, adanya kebijakan ekonomi makro (1967-1980), di mana kota sebagai pusat ekonomi. Kedua, kombinasi antara kebijaksanaan substitusi impor dan investasi asing di sektor perpabrikasi (*manufacturing*), yang justru memicu polarisasi pembangunan terpusat pada metropolitan Jakarta. Ketiga, penyebaran yang cepat dari proses mekanisasi sektor pertanian pada awal dasawarsa 1980-an, yang menyebabkan kaum muda dan para sarjana, enggan menggeluti dunia pertanian atau kembali ke daerah asal (Moertiningsih S dan Bulan O, 2015). Dalam banyak hal, peningkatan persentase penduduk perkotaan telah menimbulkan masalah-masalah perkotaan, antara lain sebagai berikut.

- 1) Sehubungan dengan pertambahan penduduk Indonesia yang cepat, maka kota-kota besar pun mempunyai penduduk yang besar pula. Hal ini dapat menyulitkan penyediaan fasilitas-fasilitas perkotaan.

- 2) Pendetang yang tidak mempunyai keahlian atau mempunyai sedikit keterampilan yang sama sekali berbeda dengan yang dibutuhkan di kota. Akibatnya, angka pengangguran di perkotaan dapat meningkat, yang dapat mengakibatkan meningkatnya masalah-masalah sosial,

- 3) Walaupun pendatang mempunyai motivasi yang kuat untuk mengembangkan dirinya di kota, tetapi kenyataannya kota sendiri belum siap menerimanya. Pada saat kota mendominasi fungsi sosial, ekonomi, pendidikan

dan hirarki urban. Hal ini menimbulkan terjadinya pengangguran dan *under employment*. Kota dipandang sebagai *inefisien* dan *artificial* proses "*pseudo-urbanisation*". Sehingga urbanisasi merupakan *variable dependen* terhadap pertumbuhan ekonomi.

2.1.4 Belanja Pemerintah

Pendapatan total perekonomian dalam jangka pendek sangat ditentukan oleh keinginan rumah tangga, perusahaan dan pemerintah untuk membelanjakan pendapatannya. Kenaikan pengeluaran yang direncanakan akan menyebabkan peningkatan permintaan agregat. Permintaan agregat akan mendorong produksi barang dan jasa yang akan menyebabkan pendapatan juga akan meningkat, (Mankiw, 2003).

Pengeluaran pemerintah adalah bagian dari kebijakan fiskal, yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya, yang tercermin dalam dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk nasional dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk daerah atau regional. Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah dalam rangka menstabilkan harga, tingkat output, maupun kesempatan kerja dan memacu atau mendorong pertumbuhan ekonomi, (Sukirno, 2013).

Peran atau campur tangan pemerintah masih sangat diperlukan yaitu apabila perekonomian sepenuhnya diatur oleh kegiatan dipasar bebas, bukan saja perekonomian tidak selalu mencapai tingkat kesempatan kerja penuh tetapi juga kestabilan kegiatan ekonomi tidak dapat diwujudkan. Akan tetapi fluktuasi kegiatan ekonomi yang lebar dari satu periode ke periode lainnya dan ini akan

menimbulkan implikasi yang serius kepada kesempatan kerja, pengangguran dan tingkat harga.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pengeluaran pemerintah versi Keynes, merupakan salah satu unsur permintaan agregat. Konsep perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran bahwa $Y = C + I + G + X - M$, formula ini dikenal sebagai identitas pendapatan nasional. Variabel Y melambangkan pendapatan nasional sekaligus mencerminkan penawaran agregat. Variabel-variabel di ruas kanan disebut permintaan agregat. Variabel G melambangkan belanja pemerintah, dengan membandingkan nilai G terhadap Y serta mengamati dari waktu ke waktu dapat diketahui seberapa besar kontribusi belanja pemerintah dalam pembentukan pendapatan nasional (Dumairy, 1996).

Teori pembangunan dan pengeluaran pemerintah dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap

menengah dan tahap lanjut: (1) tahap awal, pada tahap awal perkembangan ekonomi persentase investasi besar, sebab pemerintah harus menyediakan prasarana, seperti pendidikan, kesehatan, prasarana transportasi dan sebagainya. (2) tahap menengah, investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas, namun peranan investasi swasta sudah semakin membesar. (3) tahap lanjut, pembangunan ekonomi dan aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti program kesejahteraan hari tua dan program pelayanan dan kesehatan masyarakat (Mangkoesoebroto, 2008).

Belanja pemerintah terdiri dari belanja langsung dan tidak langsung. Belanja langsung adalah bagian belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah dan telah dianggarkan oleh pemerintah daerah.

a. Belanja pegawai adalah pengeluaran untuk upah, lembur dan pengeluaran lain untuk meningkatkan motivasi dan kualitas pegawai dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

b. Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari setahun dan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

c. Belanja modal adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian atau pembangunan aset tetap berwujud yang nilai manfaatnya lebih dari setahun dan

atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah suatu daerah.

Belanja tidak langsung adalah bagian belanja yang dianggarkan tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Seperti belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan yang telah ditetapkan oleh undang-undang, belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah.

a. Belanja pegawai adalah belanja kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang diberikan kepada DPRD dan pegawai pemerintah daerah baik yang bertugas di dalam maupun di luar daerah sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan.

b. Belanja bunga adalah pembayaran bunga utang, pembayaran yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman jangka pendek atau jangka panjang.

c. Belanja subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.

d. Belanja hibah adalah belanja yang diperlukan untuk menganggarkan pemberian uang, barang atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya.

e. Belanja bantuan sosial adalah pemberian bantuan yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif dalam bentuk uang/barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

f. Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa adalah belanja yang telah dianggarkan sebagai dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan kabupaten/kota kepada provinsi, kabupaten/kota, desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2.1.5 Indeks Biaya Hidup

Indeks biaya hidup adalah indeks harga teoritis yang mengukur biaya hidup relatif dari waktu ke waktu. Ini adalah indeks yang mengukur perbedaan harga barang dan jasa, dan memungkinkan penggantian dengan barang lain karena harga bervariasi. Ada banyak metodologi berbeda yang telah dikembangkan untuk memperkirakan indeks biaya hidup. Indeks Konüs adalah jenis indeks biaya hidup yang menggunakan fungsi pengeluaran seperti yang digunakan dalam menilai variasi kompensasi yang diharapkan. Utilitas tidak langsung yang diharapkan disamakan di kedua periode.

Dasar teori di balik indeks biaya hidup dikaitkan dengan ekonom Rusia A. A. Konüs. Teori ini mengasumsikan bahwa konsumen adalah pengoptimal dan mendapatkan utilitas sebanyak mungkin dari uang yang harus mereka keluarkan. Indeks biaya hidup dapat dihitung dengan menggunakan indikator indeks harga konsumen. Indeks Harga Konsumen (IHK) atau lebih dikenal dengan istilah *Consumer Price Index* (CPI) yaitu nomor indeks yang mengukur harga dari barang

dan jasa yang selalu digunakan para konsumen atau rumah tangga. Dan biasanya juga digunakan untuk mengukur tingkat inflasi (Sukirno, 2012).

Indeks Harga Konsumen (IHK) memberikan informasi mengenai perkembangan rata-rata perubahan harga sekelompok tetap barang atau jasa yang pada umumnya dikonsumsi oleh rumah tangga dalam suatu kurun waktu tertentu. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan atau tingkat penurunan harga barang atau jasa kebutuhan rumah tangga sehari-hari.

IHK merupakan hasil dari gabungan teoritis dan statistik yang melelahkan selama puluhan tahun. IHK mengukur biaya dari sekumpulan atau “sekeranjang” barang konsumsi dan jasa yang dipasarkan. kelompok utama dalam kumpulan ini adalah makanan, sandang, perumahan, bahan bakar, transportasi, dan perawatan kesehatan.

Suatu masalah pokok bagi IHK dan indeks harga yang lain menyangkut bagaimana menentukan bobot (*weight*) dari masing-masing harga yang berbeda. Dalam hal IHK, nilai penting suatu barang secara ekonomis diukur dari beberapa bagian (*share*) dari total pengeluaran konsumen yang digunakan untuk membeli barang tersebut pada tahun tertentu.

Indek harga Konsumen (*Consumer Price Index*) sering digunakan untuk memantau berbagai perubahan biaya hidup dari waktu ke waktu. Pada saat Indeks Harga Konsumen meningkat, rata-rata keluarga harus membelanjakan lebih banyak uang untuk mempertahankan standar hidup yang sama seperti sebelumnya. Indeks Harga Konsumen adalah ukuran keseluruhan biaya yang harus dibayar oleh seorang konsumen untuk mendapatkan berbagai barang dan

jasa sesuai dengan kebutuhan hidupnya. Indeks harga adalah angka yang dapat dipakai untuk memperlihatkan perubahan mengenai harga-harga barang, baik harga untuk satu macam barang atau beberapa macam barang. Di Indonesia lembaga yang menghitung Indeks Harga Konsumen (IHK) adalah Badan Pusat Statistik (BPS), (Ahman, 2007).

2.1.6 Konsep Kemiskinan

Dengan pendekatan ekonomi, Badan Pusat Statistik mendefinisikan bahwa kemiskinan adalah kondisi seseorang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan minimumnya, baik kebutuhan makanan maupun kebutuhan non makanan. Garis kemiskinan makanan adalah jumlah rupiah yang dibutuhkan agar seseorang dapat mengonsumsi 2100 kalori per hari selama sebulan. Sementara itu garis kemiskinan nonmakanan ditentukan berdasarkan perhitungan mengenai kebutuhan dasar seperti perumahan, pakaian, kesehatan, dan transportasi.

Kemiskinan adalah ketidaksamaan kesempatan mengakumulasi basis kekuasaan sosial, yang meliputi : asset (tanah, perumahan, peralatan, kesehatan), sumber keuangan (pendapatan dan kredit yang memadai), organisasi sosial politik yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai kepentingan bersama, jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan, barang atau jasa, pengetahuan dan keterampilan yang memadai, dan informasi yang berguna untuk memajukan kehidupan mereka (Friedman, 1992).

Kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan bersifat *multi dimensional*, artinya karena kebutuhan manusia itu bermacam-macam, maka kemiskinan pun memiliki banyak aspek primer yang berupa miskin akan aset, organisasi sosial politik, pengetahuan, dan keterampilan serta aspek sekunder yang berupa miskin akan jaringan sosial, sumber-sumber keuangan, dan

informasi. Dimensi-dimensi kemiskinan tersebut termanifestasikan dalam bentuk kekurangan gizi, air, perumahan yang sehat, perawatan kesehatan yang kurang baik, dan tingkat pendidikan yang rendah yang saling berkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini berarti kemajuan atau kemunduran pada salah satu aspek dapat memengaruhi kemajuan atau kemunduran aspek lainnya. Dan aspek lain dari kemiskinan ini adalah yang miskin itu manusianya baik secara individual maupun kolektif (Arsyad, 1999).

Agussalim (2009) dalam bukunya “Mereduksi Kemiskinan” menjelaskan bahwa secara umum, kemiskinan dapat dilihat dari dua dimensi yaitu: *pertama*, kemiskinan dapat dilihat sebagai proses dinamis, kompleks dan beragam. Kemiskinan dapat disebabkan oleh rendahnya kualitas modal manusia, pendapatan dan konsumsi serta keterbatasan akses terhadap faktor produksi (asset) dan tingkat pengembalian (return) terhadap faktor-faktor produksi tersebut. *Kedua*, kemiskinan juga merupakan akibat dan memberikan kontribusi terhadap ketertinggalan (exclusion) atau proses marginalisasi dan proses sosial, politik, dan ekonomi (termasuk pasar). Bentuk dari proses marginalisasi ini bisa tercermin dari sisi etnik, kelas masyarakat ataupun gender.

Kemiskinan dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa aspek, seperti tingkat keparahan dan penyebab. Berdasarkan tingkat keparahan kemiskinan dapat dibedakan atas kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Seseorang dikatakan miskin secara absolut apabila tingkat pendapatannya lebih rendah daripada garis kemiskinan absolut. Dengan kata lain jumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum yang dicerminkan oleh garis kemiskinan absolut tersebut. Kemiskinan relatif adalah perbandingan antara kelompok pendapatan dalam masyarakat, yaitu antara kelompok miskin, kelompok yang mungkin tidak miskin karena mempunyai tingkat pendapatan yang

lebih tinggi daripada garis kemiskinan, dan kelompok masyarakat yang relatif lebih kaya.

Berdasarkan penyebab kemiskinan dapat dibedakan menjadi kemiskinan alamiah dan kemiskinan struktural. Kemiskinan alamiah terjadi karena kegagalan individu atau lingkungan fisik sebagai objeknya hingga seseorang menjadi sulit dalam melakukan usaha atau mendapatkan pekerjaan. Dilihat dari individu, kemiskinan terjadi karena kemalasan, kurangnya keterampilan, kelemahan fisik, dan rendahnya respons dalam melihat perubahan di sekitarnya. Sedangkan dilihat dari lingkungan, kemiskinan dapat merupakan akibat dari lingkungan atau alam yang tidak mendukung, kegagalan dalam mendapatkan sumberdaya, dan perkembangan teknologi yang sangat rendah. Kemiskinan struktural melihat kemiskinan sebagai bahan relatif, dimana terdapat sekelompok masyarakat yang miskin sementara kelompok lainnya tidak miskin.

2.1.7 Pengukuran Kemiskinan

Untuk mengukur kemiskinan, Badan Pusat Statistik menggunakan pendekatan kebutuhan dasar (*basic needs*) yakni jumlah dan persentase penduduk miskin yang diukur berada di bawah garis kemiskinan. Penetapan perhitungan garis kemiskinan adalah masyarakat yang berpenghasilan dibawah Rp 7.057 per orang per hari, berasal dari perhitungan garis kemiskinan yang mencakup kebutuhan makanan dan non makanan. Untuk kebutuhan minimum makanan digunakan patokan 2.100 kilokalori per kapita per hari. Sedang untuk pengeluaran kebutuhan minimum bukan makanan meliputi pengeluaran untuk perumahan, pendidikan, dan kesehatan (BPS, 2012).

Sedangkan ukuran menurut *World Bank* menetapkan standar kemiskinan berdasarkan pendapatan per kapita. Penduduk yang pendapatannya per kapitanya